

PENDIDIKAN DAN MUTU MANUSIA

Prima Roza*

Abstract

Education is taken to be the deliberate organized attempt to help people to become intelligent (Robert M. Hutchinson, 1998). Education leads people along the way to an understanding. Education is the only way to take human-being towards more productive, and more useful life. This article is trying to overview the role of education in producing quality people, so that they will be able to become pioneers for the great future of the nation.

Mutu Manusia Indonesia

Laporan United Development Program (UNDP) dapat dijadikan acuan untuk melihat mutu manusia Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang terangkum dalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari 177 negara, posisi Indonesia berada pada ranking 111. Parameter untuk menilai mutu manusia dibagi dalam empat faktor yaitu, *Life Expectancy at birth* atau LEB; yaitu

angka harapan hidup, *Adult literacy rate* atau ALR; yaitu persentase anak umur 15 tahun atau lebih melek huruf, *Combined primary, secondary and tertiary gross enrollment ratio* atau CGER atau Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu rasio murid/mahasiswa yang terdaftar, dan *Gross Domestic Product* atau GDP, yaitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dari laporan UNDP pada tahun 2006 dapat dilihat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2004 sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia

Negara	HDI	LEB (tahun)	ALR (%)	CGER (%)	GDP/capita \$ AS
Singapura	0.916	78.9	92.5	87.3	28.077
Korea Selatan	0.912	77.3	98.0	95	20.499
Filipina	0.763	70.7	92.6	81.5	4.614
Indonesia	0.711	67.2	90.4	68.4	3609

Sumber: diolah dari Laporan UNDP tentang HDI 2006

Tabel di atas menggambarkan mutu manusia Indonesia. Di sini dapat dilihat

bahwa dibandingkan negara-negara lain di Asia, Indonesia berada pada posisi yang terendah dari semua parameter

* Dosen KK-Ilmu kemanusiaan FSRD-ITB

pengukuran. Angka harapan hidup orang Indonesia adalah yang terendah di kawasan ini. Hal itu adalah cerminan dari rendahnya kualitas hidup yang berhubungan dengan gizi, lingkungan, serta gaya hidup masyarakat. Indeks pembangunan manusia di atas juga menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara tingkat kemajuan ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dengan mutu manusianya. Semakin baik mutu manusianya, semakin besar pula pendapatan per kapitanya. Sebaliknya pendapatan per kapita yang tinggi akan membentuk manusia yang bermutu.

Angka Partisipasi Kasar pun masih didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah, dasar, menengah, dan atas. Partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi relatif masih rendah. Menurut data Depdiknas, sampai dengan tahun 2005 APK pada jenjang pendidikan tinggi (termasuk pendidikan kedinasan) baru mencapai 16.0%. Oleh sebab itu, kualitas dan produktivitas tenaga kerja kita yang merupakan cerminan dari mutu manusia Indonesia juga masih rendah. Akibatnya walaupun banyak lowongan kerja yang ditawarkan industri, kesempatan itu tidak dapat terpenuhi apalagi kalau kita kaitkan dengan kesempatan kerja di luar negeri. Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga, selain bisa dilihat dari masih dominannya lulusan SD, juga dari IPM kita di tahun 2006. IPM Indonesia 2006 masih menduduki peringkat 108 dari 177 negara dan berada jauh dibawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura yang berada pada peringkat

25, Brunai Darussalam 34, Malaysia 61, dan Filipina berada pada peringkat 84. Akibatnya kesempatan kerja terutama untuk jabatan yang tinggi tidak bisa terisi dan tenaga kerja Indonesia selalu kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

Fakta tentang rendahnya mutu manusia di atas juga didukung oleh suatu survey yang menyatakan bahwa indeks membaca orang Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Amerika Serikat 55, Jepang 38, Singapura 41, Malaysia 15, dan Indonesia hanya 0.009. Artinya tidak sampai satu judul buku pun yang dibaca setiap orang Indonesia per tahunnya. Ini berarti bahwa buku sebagai jendela ilmu belum dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia.

Program Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan yang bermutu, relevan, dan kebutuhan masyarakat yang berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari visi di atas telah diturunkan tujuh misi pendidikan

yang secara keseluruhan bermuara pada pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dirumuskan merujuk pada konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan prinsip pembangunan pendidikan seperti 'Pendidikan Untu Semua' atau *edecation for all*, Konvensi Hak Anak, Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals*, MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*. Dalam rangka mencapai sasaran di atas, telah ditetapkan tiga pi;ar utama pembangunan pendidikan Indonesia:

- Peingkatan dan perluasan akses
- Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
- Peningkatan tata kelola (*Good Governance*), akuntabilitas dan citra publik (Majalaya Tempi edisi 16-22 April 1007)

Tuntutan MDGs

Tujuan pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium pada September 2000 memprioritaskan komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan yang seara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam TPM ini, target

harus mengacu ke tahun 2015. Di bidang pendidikan, MDGs mengerucutkan rumusan tujuan program pendidikan yaitu "Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua" dengan rumusan targetnya memastikan pada 2015 semua anak di manapun baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Ada enam indikator utama sebagai pengukurannya, yakni : angka partisipasi murni (APM), di SD, APM di SMP, proporsi murid yang berhasil menamatkan SD, proporsi murid kelas I yang menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dan angka "melek" huruf usia 15-24 tahun.

Dari tujuan Pembangunan Millenium yang ikut diratifikasi Indonesia itu, amat jelas apa yang harus diapai dan bagaimana mencapainya higga tahun 2015, yaitu fokus kepada anak-anak di SD dan sekolah lanjutan pertama, serta mereka yang buta huruf pada usia 14-24 tahun. Jika hak pendidikan mereka tidak terpenuhi, berarti pemerintah telah melanggar hak asasi anak-anak Indonesia. Artinya, memastikan pada tahun 2015 semua anak Indonesia usia 7-15 tahun terlayani hak pendidikannya, dan mereka yang berusia 15-24 tahun terbebas dari buta huruf adalah pekerjaan yang amat substansial. Oleh karena itu, perlu ditempuh strategi nasional agar kepastian pemenuhan itu terjadi, misalnya benar-benar ada gerakan nasional program penuntasan pendidikan dasar. Selama ini gerakan nasional itu tidak ada, walaupun ada tidak konsisten dijalankan. Partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan guna memastikan terjadinya pemenuhan hak-hak pendidikan anak itu berlangsung, dan bukannya dimatikan.

Banyak bukti menunjukkan betapa partisipasi masyarakat dalam pendidikan "mati" karena berbagai kebijakan sesaat.

Namun demikian, disamping memberikan fokus kepada pemebangunan pendidikan yang berbasis pendidikan dasar dan menengah, Indonesia juga harus memberikan perhatian yang serius kepada pengembangan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, karena telah terbukti bahwa kemajuan sebuah negara tidak terlepas dari keberhasilan suatu negara dalam mengelola dunia perguruan tingginya. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara seperti India, Singapura, Malaysia, dan Korea selatan. Selanjutnya perguruan tinggi sebagai wahana penghasil tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas, menjadi niscaya untuk memajukan bangsa.

Strategi pembangunan perguruan tinggi ke depan haruslah membangun hubungan yang semakin kuat dengan badan-badan usaha (dunia bisnis) dan berbagai macam *stakeholder* eksternal. Kita harus memastikan bahwa sistem perguruan tinggi haruslah responsif terhadap kemampuan dan kebutuhan riset, ekonomi, dan masyarakat. Pengelola perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia bisnis, lembaga pelayanan masyarakat, lembaga penyedia pelayanan kesehatan serta *stakeholder* internal lainnya harus terus menjalin hubungan yang semakin kuat baik dalam hal strategi bersama maupun dalam pengidentifikasian topik-topik riset bersama. Dengan demikian, akan ditemukan cara belajar bersama dari

badan-badan yang bersangkutan sehingga orang-orang yang mempunyai keahlian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga-lembaga ilmiah, dan bisnis dapat pula maju bersama.

Pembangunan dan Mutu Manusia

Salah satu arsitek pembangunan Indonesia, Prof. Wijoyo Nitisastro mengatakan bahwa "dalam melaksanakan pembangunan kita tidak boleh melupakan unsur manusia yang ada didalamnya. Penduduk harus ditempatkan sebagai titik sentral pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan jika tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebaliknya, pertumbuhan SDM yang berkualitas tidak akan bisa terjadikanpa adanya pertumbuhan ekonomi".

Pembangunan bukanlah sekedar mendirikan gedung-gedung, membangun jalan-jalan. Pembangunan harus berguna bagi penduduk yang tinggal didalamnya. Pembangunan harus mengangkat kaulitas dari masyarakatnya. Dalam membangun SDM, perhatian juga tidak boleh diarahkan kedalam negri saja, tetapi juga harus berorientasi ke luar, kepada dunia yang berlari begitu cepat dan begitu terbuka.

Semua negara di dunia saling berlomba memacu kualitas SDM-nya, karena hanya mereka yang mampu berlari kencang dan lebih unggul yang akan mampu memenangkan persaingan. Mereka yang gagal menghasilkan manusia manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan produktivitas

yang tinggi, pada akhirnya hanya akan menjadi penonton, atau maksimum menjadi pasar bagi negara-negara produsen dan maju. Negara-negara yang gagal itu akan mempunyai posisi tawar yang sangat rendah dan lama kelamaan akan menjadi negara yang terbelakang dan tertinggal. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan merupakan program yang harus menjadi primadona dari seluruh program pembangunan pemerintah, untuk menjadikan manusia-manusia Indonesia yang bermutu yang pada gilirannya akan mengakselerasi pertumbuhan negara.

Philip Kottler dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan formal berperan strategis dalam pembangunan ekonomi. Tanpa pendidikan, berdiri kokoh penghalang upaya pembangunan ekonomi. Sebaliknya melalui manusia terdidik akan didiseminasikan nilai-nilai yang relevan dengan pembangunan ekonomi. Kesimpulan ini diambil Kottler dari hasil penelitiannya di Singapura dan Korea Selatan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pembangunannya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Di kedua negara itu, diawal pembangunannya, disamping membangun infrastruktur fisik, sekaligus juga dibangun infrastruktur sumber daya manusia melalui persekolahan dan pelatihan. Dalam jangka 25 tahun Korea Selatan dan Singapura telah berhasil memposisikan dirinya menjadi sejajar dengan negara-negara maju dunia dengan pendapatan per kapita lebih dari 20.000 dollar Amerika Serikat per tahun. Dengan pendidikan, kedua negara ini melakukan suatu lompatan kuantum.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia ke depan harus mampu bersaing dengan sehat dan kuat dengan bangsa lain di dunia dan menjadi bangsa yang maju. Hal itu hanya dapat dilakukan apabila kita mampu mempersiapkan dunia pendidikan kita yang secara efektif dapat menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemandirian, mampu bekerja secara professional, dan bisa membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta siap bersaing di pasar global. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, kita hanya akan menjadi pecundang di dunia yang semakin terbuka.

Visi pendidikan kita sudah saatnya diarahkan pencapaian kemajuan ekonomi yang pada gilirannya akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju sejajar dengan negara besar dunia lainnya.

Daftar Pustaka

1. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 2005.
2. Prasetya, Erwin Edhi. Visi 2030 dan Pendidikan : Kontribusi Untuk Masa depan Ekonomi. Kompas, Rabu 30 Mei 2007.
3. Hutchins M. Robert The Learning Society : A Mentor Book, The Britannica Perspectives, 1998.

4. UNDP *Report on Human Development Index*, 2006.
5. Jarvis, Peter. *Universities and Corporate Universities : The Higher Learning Industries in Globalization*. London, Kogan Page Industries. 2001.